



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## triwulan I - 2024

Balai Riset Perikanan  
Peraian Umum  
dan Penyuluhan Perikanan



Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan SDM KP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan



# Tim Penyusun

**Kepala BRPPUPP**

**Kepala Subbagian Umum**

**Nurwanti S.Ikom, M.Si**

**Acim Tirtana, SE**

**Lisnawati, SE**

**Rian Ariadi Harahap, S.AP**

**Muthia Nurlestari Putri, S.Pi**

**Arismansyah, S.Pi**



## KATA PENGANTAR

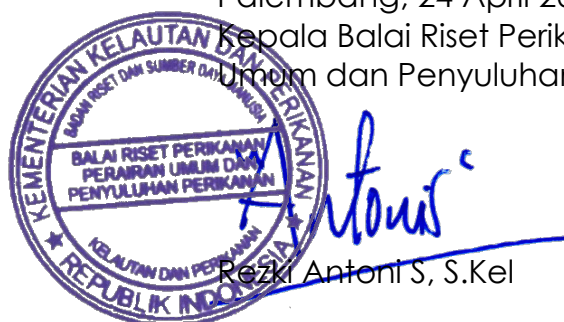
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024. LKjIP BRPPUPP disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BRPPUPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan kegiatan manajerial dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, 24 April 2024

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan  
Umum dan Penyuluhan Perikanan



## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	2
1.2.Tujuan.....	3
1.3.Tugas dan Fungsi .....	3
1.4.Keragaan SDM BRPPUPP.....	5
1.5.Sistematika Laporan Kerja .....	6
1.6 Potensi dan Permasalahan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1.Rencana Strategis .....	12
2.2.Rencana Kerja Tahunan.....	22
2.3.Perjanjian Kinerja .....	23
2.4.Pengukuran Kinerja .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>27</b>
3.1.Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024 .....	28
3.2.Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	28
3.3.Akuntabilitas Keuangan .....	60
3.4.Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024 .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1.Capaian Kinerja Utama.....	67
4.2.Permasalahan dan Rekomendasi .....	69
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Output dan Pagu Anggaran BRPPUPP TW I TA 2024.....	22
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP TW I TA 2024.....	23
Tabel 3. Indeks Capaian IKU.....	24
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja TW I TA 2024 .....	28
Tabel 5. Capaian IKU 1 .....	30
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 1 Dengan Satminkal lain .....	31
Tabel 7. Capaian IKU 2.....	32
Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU 2 Dengan Satminkal lain .....	33
Tabel 9. Capaian IKU 3.....	34
Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU 3 Dengan Satminkal lain .....	35
Tabel 11. Capaian IKU 4.....	36
Tabel 12. Capaian IKU 5.....	37
Tabel 13. Capaian IKU 6.....	38
Tabel 14. Capaian IKU 7.....	39
Tabel 15. Rincian PNPB TW I TA 2024.....	40
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU 7 Dengan Satminkal lain .....	41
Tabel 17. Capaian IKU 8.....	42
Tabel 18. Capaian IKU 9.....	42
Tabel 19. Capaian IKU 10.....	46
Tabel 20. Capaian IKU 11 .....	47
Tabel 21. Capaian IKU 12.....	49
Tabel 22. Capaian IKU 13.....	50
Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU 13 Dengan Satminkal lain .....	51
Tabel 24. Capaian IKU 14.....	52
Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU 14 Dengan Satminkal lain .....	53
Tabel 26. Capaian IKU 15 .....	53
Tabel 27. Capaian IKU 16.....	54
Tabel 28. Capaian IKU 17.....	55

Tabel 29. Capaian IKU 18.....	56
Tabel 30. Perbandingan Capaian IKU 20 Dengan Satminkal lain .....	57
Tabel 31. Capaian IKU 19.....	58
Tabel 32. Perbandingan Capaian IKU 19 Dengan Satminkal lain .....	59
Tabel 33. Realisasi Anggaran BRPPUPP TW I TA 2024 .....	60
Tabel 34. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU.....	62

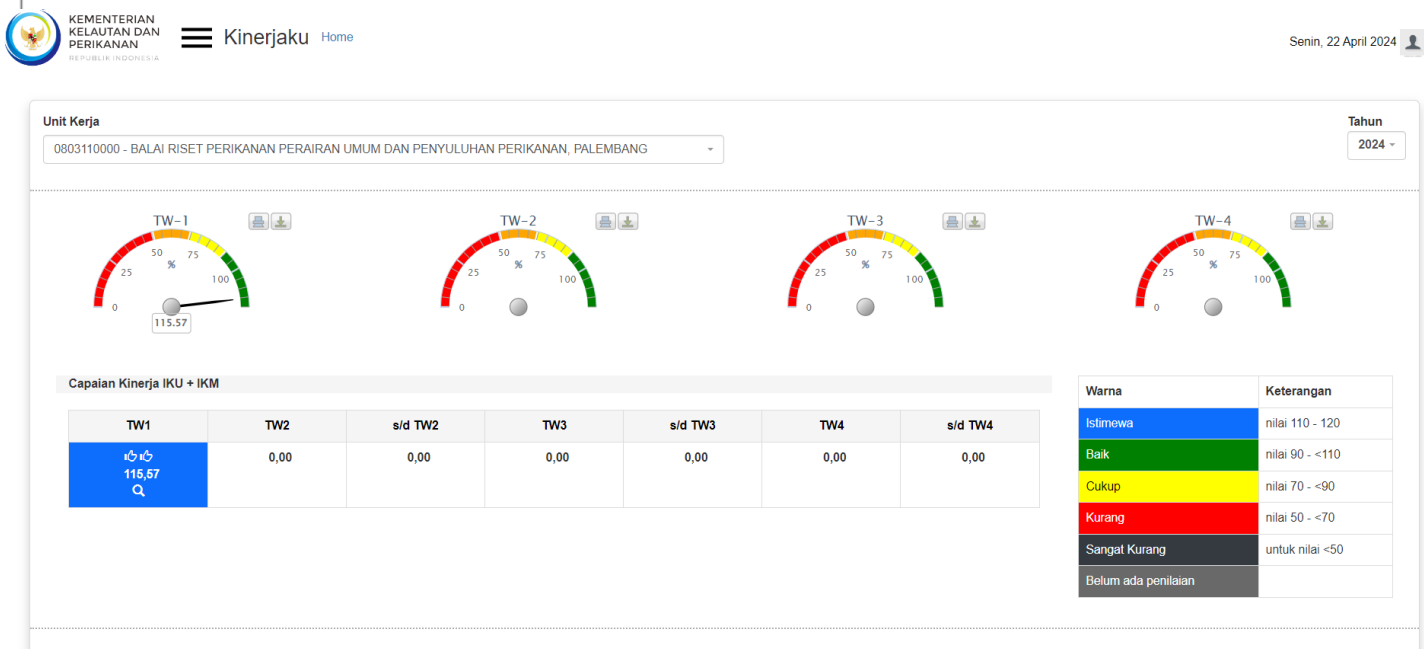
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP .....	5
Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP TW I TA 2024.....	6
Gambar 2.1 Sasaran Kegiatan BRPPUPP TW I TA 2024 .....	7
Gambar 3. Dashboard Kinerja TW I TA 2024.....	27
Gambar 4. Dashboard Kinerja TW I TA 2024.....	67

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2020-2024, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-1 yaitu merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten.

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat TW I TA 2024 sebesar 115,57%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Pada Triwulan I TA 2024 dari 19 IKU terdapat 8 IKU BRPPUPP yang telah mencapai target sehingga berstatus biru dan hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP tercapai sebanyak 1.110 kelompok dari target triwulan I tahun 2024 sebanyak 900 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
2. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP tercapai 6 kelompok dari target triwulan I Tahun 2024 sebanyak 5 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
3. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP tercapai sebanyak 131 kelompok dari target triwulan I Tahun 2024 sebanyak 70 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
4. Nilai PNBP Satker BRPPU-PP dengan capaian di triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 14.552.427 dengan target triwulan I sebesar Rp 12.745.639 dengan persentase sebesar 114,18%
5. Persentase Unit Kerja BRPPUP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar tercapai sebesar 133,33% dengan target triwulan I Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 94% dengan persentase sebesar 120%
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUP-PP dengan capaian sebesar 100% melebihi target yang telah ditentukan dan persentase sebesar 120%
7. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

## Capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP TA. 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TW I 2024		%
				TARGET	CAPAIAN	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok)	900	1.110	120
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)	5	6	120
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok)	70	131	120
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	-	-	-
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	-	-	-
		6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok)	-	-	-
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Nilai PNBP satker BRPPU-PP (Rupiah)	12.745.639	14.552.427	114,18
		8	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)			
		9	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUP-PP (%)	-	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)	-	-	-
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)	-	-	-
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	-	-	-
		13	Persentase Unit Kerja BRPPUP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	133,33	120
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUP-PP (%)	82	100	120
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)	-	-	-
		16	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)	-	-	-
		17	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	-	-	-
18	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPU-PP (%)	100	100	100		
19	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100	100	100		

Secara umum kinerja BRPPUPP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
2. BRPPUPP sudah melakukan reviu renstra pada tahun 2023 namun belum disertai dengan perbaikan target kinerja tahun 2024 sesuai kebijakan perencanaan. Sehingga pada pembahasan perbandingan indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja jangka menengah masih membandingkan dengan target yang sebelumnya.

Terkait permasalahan tersebut diatas, hal yang dapat direkomendasikan antara lain adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM KP maupun Pusat terkait informasi nomenklatur organisasi, tata kerja, serta tugas pokok dan fungsi balai yang baru, dan menyampaikan progresnya di internal BRPPUPP secara berkala melalui kegiatan apel pagi maupun kegiatan koordinasi lainnya.
2. Melakukan reviu renstra dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kebijakan terkait perubahan target perjanjian kinerja di tahun 2023 dan 2024.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPPUPP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPPUPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPPUPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRPPUPP triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. **18.136.979.704,-** atau 21,03% dari pagu anggaran Rp. **86.207.989.000,-**

# BAB I - PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tujuan
- Tugas dan Fungsi
- Keragaman SDM BRPPUPP
- Sistematika Laporan Kinerja
- Potensi dan Permasalahan





## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) tahun 2020-2024, di mana keduanya mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BPPSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan didalamnya juga mengatur tentang pembentukan Pusat Riset Perikanan dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan

dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP adalah melaksanakan kegiatan maj dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung dengan jumlah penyuluh sebanyak 467 orang. Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016.

## **1.2. Tujuan**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPPUPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada triwulan I Tahun 2024.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPPUPP untuk meningkatkan Kinerjanya.

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Penyuluhan Perikanan yang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
6. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

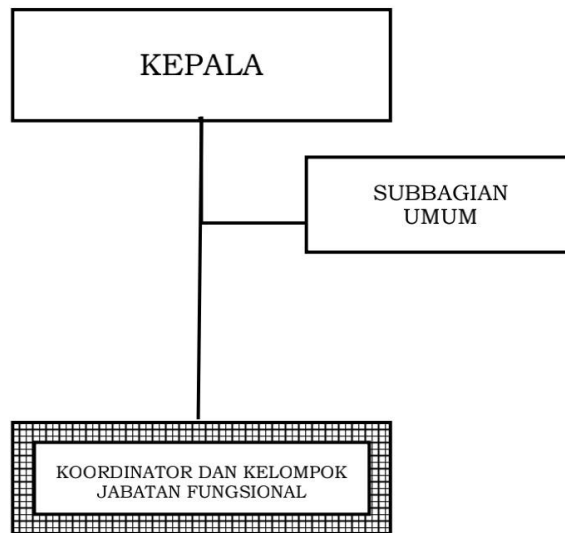
Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian umum dan kelompok fungsional, namun saat ini pasca penyetaraan jabatan struktural ke fungsional masih terdapat Subkoordinator dan Pelaksana yang sebelumnya merupakan pejabat struktural eselon IV dan V yaitu:

Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Tata Operasional, dan Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana, serta Subkoordinator Penyuluhan. Subkoordinator Tata Usaha terdiri atas Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum dan Pelaksana Urusan Kepegawaian, Subkoordinator Tata Operasional terdiri dari Pelaksana urusan Program dan Anggaran dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas Pelaksana Urusan Pelayanan Teknis dan Pelaksana Urusan Prasarana dan Sarana, dan Subkoordinator Penyuluhan terdiri atas Pelaksana urusan Kelembagaan Kelompok dan Pelaksana urusan Penyelenggaraan.

Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B. 833/BRSDM-BRPPUPP/KP.440/VIII/2023, Kepala BRPPUPP dibantu oleh 2 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Manajerial dan Tim Kerja Penyuluhan untuk mewujudkan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian fungsi dan tugas sebagai berikut :

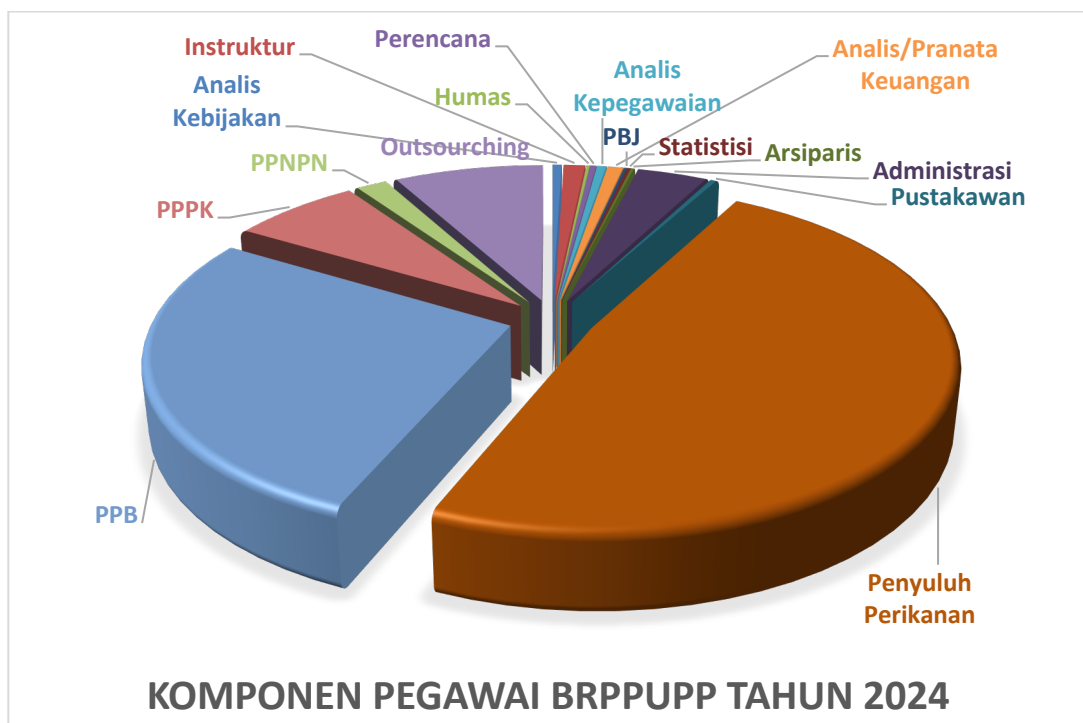
1. Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial dan penyuluhan tersusun rapi
2. Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan
3. Kegiatan sesuai dengan perencanaan
4. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja
5. Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
6. Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

#### 1.4. Keragaan SDM BRPPUPP

BRPPUPP Palembang dikepalai oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), 1 Kasubbag Umum dan didukung oleh 592 Pegawai terdiri atas terdiri atas 3 orang Analis Kebijakan, 7

orang Instruktur, 1 orang Humas, 1 orang Perencana, 3 orang Analis Kepegawaian, 5 orang Analis/Pranata Keuangan, 1 orang PBJ, 1 orang Statistisi, 1 orang Arsiparis, 23 orang tenaga Administrasi, 2 orang Pustakawan, 278 orang Penyuluh Perikanan, 150 orang Penyuluh Perikanan Bantu, P3K Penyuluh 52 Orang, 10 orang tenaga PPNPN, 52 orang tenaga Outsourcing. Tenaga PPNPN dan outsourcing berperan dalam membantu kegiatan administrasi, security, Driver, cleaning service, Gardener.

Jumlah pegawai BRPPUPP tersaji dalam grafik dibawah ini:



Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2024

### 1.5. Sistematika Laporan Kerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan I Tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPPUPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPSDM

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPPUPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPPUPP Tahun 2024 serta Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2024.
4. **Bab IV Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

## 1.6 Potensi dan Permasalahan

### a. Potensi

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor.

Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun, yaitu 5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap didominasi

perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%) sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%).

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 trilyun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut.

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/perairan umum dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen penting dalam keberlanjutan perikanan perairan umum itu sendiri.

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat. Terhitung mulai 01 Januari 2018 penyuluh perikanan secara administrasi dibagi menjadi 9 Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang tersebar di Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN, dengan demikian fungsi BRPPUPP di bidang riset perikanan perairan umum daratan hilang dan berfokus di kegiatan manajerial dan Penyuluhan Perikanan.

## **b. Permasalahan**

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset dan penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
- 2) BRPPUPP sudah melakukan reviu renstra pada tahun 2023 namun belum disertai dengan perbaikan target kinerja tahun 2024 sesuai kebijakan perencanaan. Sehingga pada pembahasan perbandingan indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja jangka menengah masih membandingkan dengan target yang sebelumnya.
- 3) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPPUPP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi.
- 4) Jumlah sebaran dan kompetensi penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
- 5) Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 6) Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:
  - i. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;



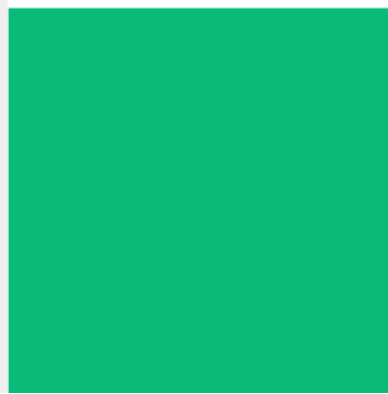
- ii. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- iii. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
- iv. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- v. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- i. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- ii. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- iii. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai;
- iv. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- v. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- vi. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- vii. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- viii. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

# BAB II - PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Rencana Kerja Tahunan
- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja



## 2.1. Rencana Strategis

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, salah satunya adalah perairan umum daratan. Perairan umum di Indonesia tercatat seluas 54 juta ha, terdiri dari 12 juta ha sungai dan rawa, 2,1 juta ha danau (alami dan buatan), dan 39,9 juta ha perairan rawa pasang surut. Perairan umum mempunyai posisi strategis dan berfungsi serba guna, selain dimanfaatkan oleh sektor perikanan juga dimanfaatkan oleh sektor Pekerjaan Umum, perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi, perhubungan dan pemukiman (Ilyas *et al*, 1990).

Perairan umum daratan terdiri dari sungai, rawa (rawa banjir, rawa gambut dan rawa pasang surut), estuaria, danau dan waduk serta genangan air lainnya. Sungai merupakan perairan yang mengalir (*lotic water*), memiliki karakteristik mengalir searah dari hulu ke hilir, aliran bagian hulu lebih deras dari pada yang hilir (Ewusie, 1990; Odum, 1993). Sungai-sungai besar banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Keanekaragaman ikan di sungai cukup tinggi sebagai contoh di DAS Kapuas telah ditemukan lebih dari 300 jenis ikan, di DAS Barito lebih dari 110 jenis, sedangkan di DAS Musi lebih dari 200 jenis (Dudley, 1996; Husnah *et al.*, 2008). Tiap tipe ekosistem sungai bagian hulu, tengah dan hilir mempunyai jenis ikan yang khas. Jenis ikan khas di hulu sungai (*up-stream*) sebagai contoh ikan Semah (*Tor douronensis*), bagian tengah (*middle-stream*) yaitu ikan Belida (*Chitala lopis*), dan bagian hilir (*lower-stream*) yaitu Sembilang (*Paraplotosus albilabris*) (Utomo, *et al* 2007). Keanekaragaman jenis ikan penghuni sungai cukup tinggi, namun belum ada data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini karena penelitian masih bersifat spasial.

Setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005-2009, pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada RPJMN II 2010-2014 semakin menjadi arus utama. Demikian pula dengan sub sektor perikanan tangkap di dalamnya, baik itu perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum daratan (PUD). Pelaksanaan pengarusutamaan tersebut mengacu kepada tema RPJMN II sebagaimana telah tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yakni “memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian”. Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014. RPJMN dimaksud menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan diadopsi menjadi Renstra Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Dan BRPPUPP Palembang memiliki penyuluh perikanan sebanyak 483 orang yang tersebar di 5 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPPUPP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi. Sampai Triwulan IV, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BRPPUPP masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 73/PERMEN-KP/2020. Namun demikian telah dilakukan penyesuaian dan review Renstra BRPPUPP yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BRPPUPP.

## 1. Visi

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional dengan kuatnya ketahanan pangan, tingkat kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat diperlukan pembangunan fundamental berdasarkan kajian yang terukur dan dapat diimplementasikan *stakeholder* perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pelaksana dalam pengkajian sumberdaya dan pemanfaatan perikanan khususnya wilayah daratan bertanggung jawab secara langsung guna memberikan kajian, analisa, data, dan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam pembangunan perikanan daratan. Visi BRPPUPP Berdasarkan Visi pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga mengacu visi Presiden 2020-2024 yaitu:

**"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**. Dari visi Presiden kemudian ditetapkan visi KKP 2020-2024

untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden. Visi KKP 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Selanjutnya BPPSDM KP untuk mendukung visi KKP menetapkan visi BRDSM KP 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong**. Visi Pusat Riset Perikanan adalah **“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong melalui riset dan inovasi iptek perikanan”**.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan **SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong**. Adapun keinginan tersebut dituangkan dalam visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut:

**“Mewujudkan Sains Dan Teknologi Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kelestarian dan Pemanfaatan yang Berkesinambungan”**

## 2. Misi

Dalam pencapaian Visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- b. Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan;
- c. Melakukan penelitian bio-ekologi ikan di perairan umum daratan;
- d. Meningkatkan pemanfaatan praktis hasil penelitian melalui diseminasi, simposium dan workshop kepada stakeholder;
- e. Menyebarkan informasi dan teknologi hasil penelitian dalam berbagai bentuk publikasi ilmiah dan semi ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan

Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694). BRPPUPP memiliki tugas Melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, dengan fungsi /uraian tugas sebagai berikut :

- a.** Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b.** Pelaksanaan riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
- c.** Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan perairan umum daratan;
- d.** Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e.** Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f.** Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
- g.** Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **3. Tujuan**

Sesuai dengan Visi dan Misi BRPPUPP yang telah dijelaskan tersebut diatas bertujuan untuk:

- a. Melestarikan Sumber plasma nutfah perikanan di perairan umum daratan
- b. Melestarikan dan memelihara kesehatan lingkungan ekosistem perairan umum daratan
- c. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan di perairan umum daratan
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM untuk melakukan riset.
- f. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana riset
- f. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan

#### 4. Sasaran Strategis

Renstra BRPPUPP Tahun 2020 – 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRPPUPP sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework*.

Pada tahun 2024 ini, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebagai bentuk dukungan untuk mencapai Sasaran Strategis pada Level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sasaran Program pada Level 1 BPPSDM, serta Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis pada Level 0 KKP dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja, BRPPUPP mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja, sebagai berikut :

##### 1. SS3. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat

IK7. Nilai PNBP Sektor KP

IK8. Tenaga Kerja yang Terlibat

##### 2. SS8. Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas

IK17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP

IK18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP

Sedangkan dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Program pada Level 1 BPPSDM, BRPPUPP mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program, yaitu :

##### 1. SP1. SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

IKP2. Nilai PNBP BPPSDM

##### 2. SP3. Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk

IKP4. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk

IKP5. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya

IKP6. Tenaga Kerja yang Terlibat lingkup BPPSDM

##### 3. SP4. Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

IKP7. Desa/Kawasan Mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas)

#### **4. SP7.Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPSDM**

IKP12. Batas Tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BPPSDM TA.2022

IKP13. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM

IKP14. Nilai PM SAKIP BPPSDM

IKP16. Persentase Unit Kerja Lingkup BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

IKP17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDM

IK19. Nilai IKPA lingkup BPPSDM

IK20. Nilai NKA lingkup BPPSDM

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mendukung Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai berikut :

##### **1. Pusat Riset Perikanan**

Dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan, BRPPUPP mendukung 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

#### **SK.2.Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

**IKK2.** Nilai PNBK Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan

**IKK3.** Batas Tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan realisasi anggaran Pusat Riset Perikanan TA.2022 **IKK4.**Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan

**IKK5.** Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan

**IKK6.** Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan

**IKK7.** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Pusat Riset Perikanan

**IKK8.** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Perikanan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

**IKK9.** Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan

**IKK10.** Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan



**IKK11.** Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti lingkup Pusat Riset Perikanan

**IKK12.** Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan

## 2. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan, BRPPUPP mendukung 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

### **SK5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan IKK9. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh**

**IKK10.** Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya

**IKK11.** Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk

**IKK12.** Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

### **SK.6.Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP**

**IKK13.** Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)

### **SK.9.Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

**IKK19.** Persentasae Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selanjutnya, BRPPUPP mendukung Sasaran Strategis Level 0, Sasaran Program Level 1, dan Sasaran Kegiatan Level 2 pada tahun 2023, melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut.

### **SK1.Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

**IKK1.** Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPPUPP dengan target pada tahun 2020 sejumlah 4.853 kelompok menjadi 5.600 kelompok pada tahun 2024

**IKK2.** Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP pada tahun 2020 tidak terdapat target menjadi 223 kelompok pada tahun 2024

**IKK3.** Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPPUPP pada tahun 2020 tidak terdapat target menjadi 530 kelompok pada tahun 2024

**IKK4.** Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang baru ada pada tahun 2022 dengan target 1.300, pada tahun 2023 target menjadi 1.068, dan target tahun 2024 1.075 tetapi belum terdapat target pada Renstra BRPPUPP

#### **SK2.Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP**

**IKK5.** Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) di BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target 2 desa, sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan target ditahun 2024 sebanyak 3 Desa.

**IKK6.** Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP pada tahun 2020 targetnya 1 menjadi 2 kelompok pada tahun 2024

#### **SK3.Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

**IKK7.** Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP pada tahun 2023 terdapat 1 target, namun pada tahun 2024 tidak terdapat target pada Renstra BRPPUPP

**IKK8.** Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP pada tahun 2023 terdapat 1 target, namun pada tahun 2024 tidak terdapat target pada Renstra BRPPUPP

#### **SK4. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

**IKK9.** Nilai PNBP BRPPU-PP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target 0,047 Rupiah Milyar, sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan ditahun 2024 target PNBP BRPPUPP sebesar Rp 40.000.000,-

**IKK10.** Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPU-PP pada tahun 2020-2022 targetnya <1%, selanjutnya pada tahun 2023 berubah menjadi <0,5%, sedangkan pada tahun 2024 sesuai dengan Renstra BRPPUPP adalah sebesar 0,5%

**IKK11.** Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP pada tahun 2020 memiliki target 72, dan pada tahun 2024 menjadi 80

**IKK12.** Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target nilai 76 sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan ditahun 2024 terdapat target sebesar 79.

**IKK13.** Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP baru terdapat target pada tahun 2021 sebesar 87, selanjutnya pada tahun 2022 sebesar 92, pada tahun 2023 sebesar 93, namun pada tahun 2024 targetnya sebesar 94.

**IKK14.** Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar pada tahun 2022 memiliki target sebesar 82 dan pada tahun 2024 menjadi 94

**IKK15.** Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target nilai 80 sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan ditahun 2024 terdapat target sebesar 82.

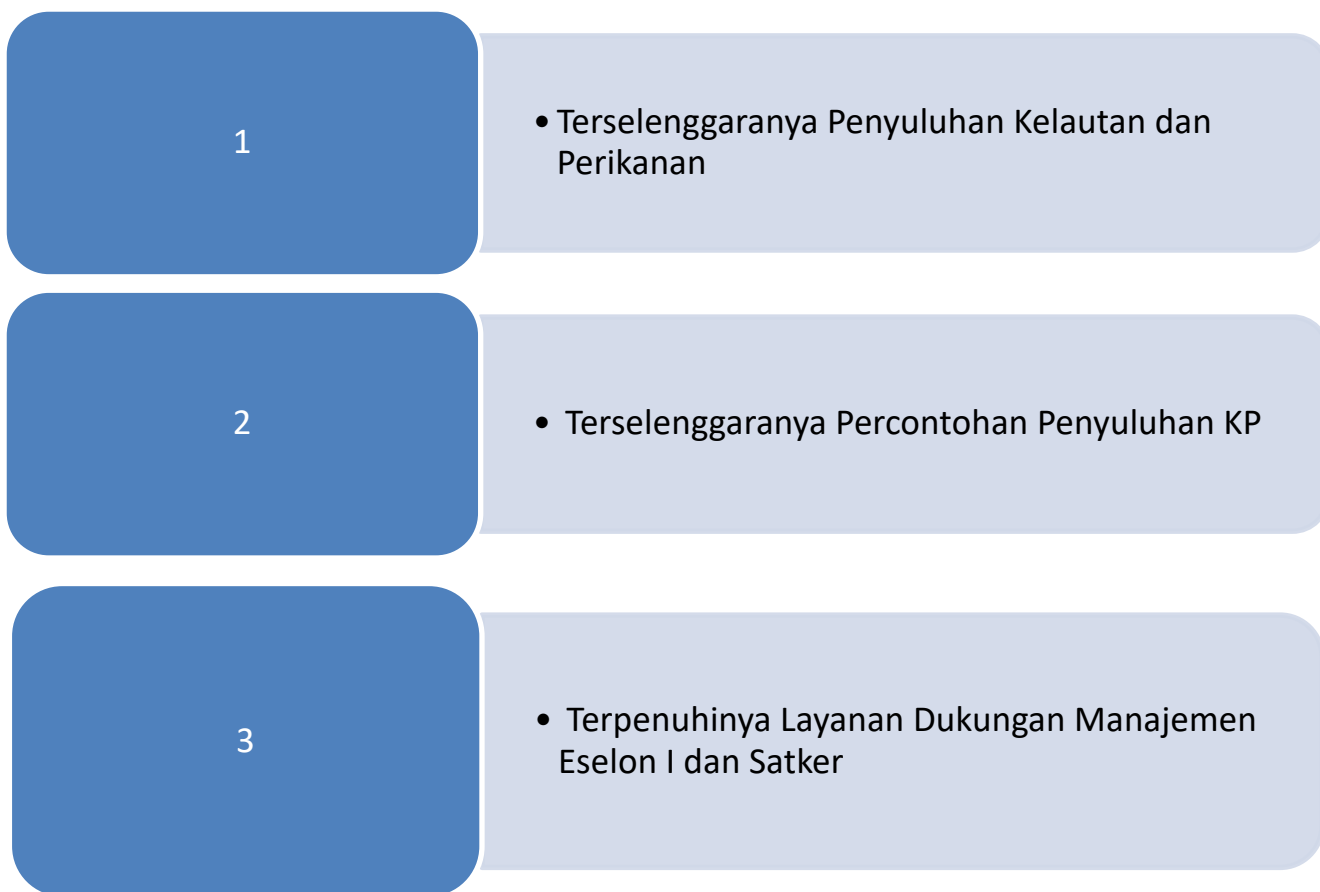
**IKK16.** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP pada tahun 2020 memiliki target 88 dan menjadi 93,76 pada tahun 2024

**IKK17.** Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP pada tahun 2020 memiliki target 85 dan menjadi 82 pada tahun 2024

**IKK18.** Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target 3 kemitraan, sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan tahun 2024 terdapat target sebanyak 4 kemitraan BRPPU-PP

**IKK19.** Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP baru terdapat target pada tahun 2021 yaitu sebesar 100%, kemudian pada tahun 2022-2024 target sebesar 100%

**IKK20.** Persentase layanan dukungan manajemen internal BRPPUPP baru terdapat target pada tahun 2021 yaitu sebesar 100%, kemudian pada tahun 2022- 2024 target sebesar 100%



Gambar 2.1. Sasaran Kegiatan BRPPUPP tahun 2024

## 2.2. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPPUPP Tahun 2024 menetapkan 2 program yaitu Pendidikan dan pelatihan vokasi, Riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp. 86.207.989.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Output dan pagu anggaran 2024

No	OUTPUT	ANGGARAN	Revisi 1 (revisi POK)	Revisi 2 (Blokir AA)	Revisi 3 (Revisi POK)	Revisi 4 (Revisi POK)	Revisi 5 (Halaman 3 DIPA)
1	<b>PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>10.380.600.000</b>	<b>10.380.600.000</b>	<b>10.380.600.000</b>	<b>10.380.600.000</b>	<b>10.380.600.000</b>	<b>10.380.600.000</b>
	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dari penyuluh KP	7.720.600.000	7.720.600.000	7.720.600.000	7.720.600.000	7.720.600.000	7.720.600.000
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	2.660.000.000	2.660.000.000	2.660.000.000	2.660.000.000	2.660.000.000	2.660.000.000
	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP	-	-	-	-	-	-
	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-
2	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</b>	<b>75.827.389.000</b>	<b>75.827.389.000</b>	<b>75.827.389.000</b>	<b>75.827.389.000</b>	<b>75.827.389.000</b>	<b>75.827.389.000</b>
	Layanan BMN	21.650.000	21.650.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Layanan Hubungan Masyarakat	46.743.000	46.743.000	15.073.000	15.073.000	15.073.000	15.073.000
	Layanan Umum	317.902.000	317.902.000	286.410.000	286.410.000	286.410.000	286.410.000
	Layanan Perkantoran	75.152.009.000	75.152.009.000	75.152.009.000	75.152.009.000	75.152.009.000	75.152.009.000
	Layanan Manajemen SDM	73.340.000	73.340.000	184.142.000	184.142.000	184.142.000	184.142.000
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	82.035.000	82.035.000	45.340.000	45.340.000	45.340.000	45.340.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	102.710.000	102.710.000	84.060.000	84.060.000	84.060.000	84.060.000
Layanan Manajemen Keuangan	30.000.000	30.000.000	59.595.000	59.595.000	59.595.000	59.595.000	
<b>TOTAL</b>	<b>86.207.989.000</b>	<b>86.207.989.000</b>	<b>86.207.989.000</b>	<b>86.207.989.000</b>	<b>86.207.989.000</b>	<b>86.207.989.000</b>	<b>86.207.989.000</b>

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja BRPPUPP Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala BRPPUPP dengan Eselon II terkait, yaitu Kepala Pusat Riset Perikanan dan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja (IK) dan target.

#### A. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Riset Perikanan

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Riset Perikanan memiliki 1 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusrisikan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1.	Nilai PNBP Satker BRPPU-PP (Rupiah)	40.000.000
		2.	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)	5
		3.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUP-PP (%)	≤0,5
		4.	Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)	80
		5.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)	79
		6.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	94
		7.	Persentase Unit Kerja BRPPUP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUP-PP (%)	82
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)	93,76
		10.	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)	82
		11.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPPUP-PP (kemitraan)	4
		12.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPPU-PP (%)	100

## B. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP memiliki 3 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Puslatluh

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok)	5.600
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)	223
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok)	530
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1.075
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	3
		6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok)	2
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100

## 2.4. Pengukuran Kinerja

### 1. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRPUPP TW 1 Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

### 2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPPUPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BRPPUPP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Kepala BRPPUPP NOMOR: B.106/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala BRPPUPP. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, seksi Tata Operasional BRPPUPP merangkum seluruh



hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan

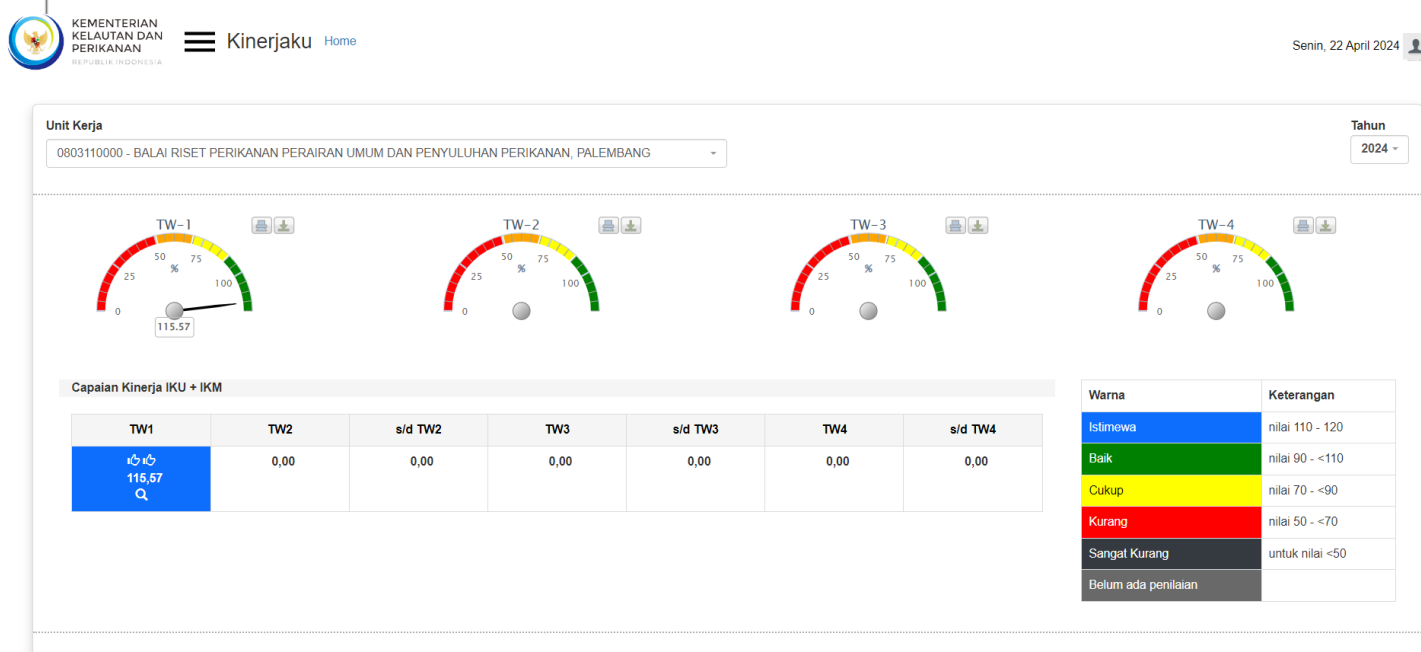
# BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

- Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024
- Evaluasi dan Analisis Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan
- Efisiensi Anggaran dan Aloksi Sumberdaya  
BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024



### 3.1. Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2024 sebesar 115,57% per 22 April 2024, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Dashbord Kinerja Triwulan I Tahun 2024 BRPPUPP

Selama Triwulan I tahun 2024, dari target 19 IKU BRPPUPP terdapat 8 IKU yang telah mencapai target di Triwulan I Tahun 2024, sehingga berstatus hijau dan biru.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPPUPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPPUPP yang menjadi kontrak kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 dapat tercapai.

Tabel. 4. Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	TRIWULAN 1		%
			TARGET	CAPAIAN	
1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok)	5600	900	1.110	120
2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)	223	5	6	120
3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok)	530	70	131	120
4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	-	-	-	-
5	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	-	-	-	-
6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok)	-	-	-	-
7	Nilai PNBP Satker BRPPU-PP (Rupiah)	40.000.000	12.745.639	14.552.427	114,18
8	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)	5	-	-	-
9	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUP-PP (%)	-	-	-	-
10	Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (Indeks)	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	TRIWULAN 1		%
			TARGET	CAPAIAN	
11	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (Nilai)	-	-	-	-
12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	-	-	-	-
13	Persentase Unit Kerja BRPPUP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUP-PP (%)	82	82	100	120
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)	93,76	-	-	-
16	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)	82	-	-	-
17	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	4	-	-	-
18	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPPU-PP (%)	100	100	100	100
19	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100	100	100	100

**SASARAN KEGIATAN 1 :**

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

**Indikator Kinerja 1**

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap

berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Tabel 5. Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok)

**Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok)**

Realisasi TW I			Triwulan I 2024				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
5.888	2.671	991	900	1.110	123,33	12,01	5.600	19,82

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian indikator kinerja ini telah mencapai persentase sebesar 120% dari target yang ditetapkan. Realisasi yang didapat adalah sebesar 1.110 kelompok dengan target di TW I Tahun 2024 sebanyak 900 kelompok. Pada TW I tahun 2023 indikator ini telah tercapai sebesar 991 kelompok. Dilihat dari jumlah realisasi dan jika dibandingkan dengan TW I tahun sebelumnya, realisasi pada TW I Tahun 2024 lebih tinggi dengan persentase kenaikan sebesar 12,01% dan realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan.

Perolehan capaian indikator kinerja yang melebihi target ini dapat dikarenakan kinerja penyuluh perikanan SATMINKAL BRPPUPP sangat baik dan mengalami peningkatan kinerja di TW I tahun 2024. Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BRPPUPP dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Penyuluh perikanan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyuluhan kelompok dan harus dituangkan di SKP, sehingga seluruh Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Terbitnya Peraturan Kepala BPPSDM KP No. 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan P3K, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
3. Profil Kelompok pelaku utama / usaha yang disuluh disusun dan diperbarui sebagai data dukung indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 1.367.920.621 (17,41%) dengan pagu Rp 7.857.400.000

Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok) ini jika dibandingkan dengan 2 (dua) Satminkal lain lingkup BPPSDM KP dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok) Triwulan I Tahun 2024 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	900	1.110	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1.500	1.913	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	500	500	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 120%.

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 7.720.600.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.367.920.621 (19,95%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100,05%.

## Indikator Kinerja 2

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)



Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kriteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau; Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Adapun pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung jumlah kelompok pelaku utama/usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dari Jumlah Kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 7. Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)

**Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
1	0	2	5	6	120,00	200,00	223	2,69

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator ini pada triwulan I Tahun 2024 telah mendapat realisasi sebanyak 6 kelompok dari target yang ditetapkan yaitu 5 kelompok, sehingga persentase capaian untuk indikator ini sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi pada periode yang sama di triwulan I tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 200% di TW I 2024 dimana indikator ini mencapai realisasi 6 kelompok. Kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya dapat dikarenakan data dukung yang disampaikan oleh penyuluh sesuai dengan ketentuan sehingga data tersebut dapat dijadikan capaian IKU ini.

Perolehan nilai capaian indikator berikut dapat dikarenakan penyuluh SATMINKAL BRPPUPP telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kelas kelompok kelautan dan perikanan yang mereka suluh, sehingga capaian pada indikator berikut dapat melebihi target.



Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP pada triwulan I Tahun 2024 dapat melampaui target antara lain adalah telah dilakukannya pendampingan kelompok oleh Penyuluh perikanan serta melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya untuk mencapai target kinerja sesuai jabatan dan merupakan IKU utama penyuluh yang nantinya dituangkan di SKP. Juga Kelompok yang telah dilakukan penilaian telah memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Puslatluh KP,
- c) Pelaporan online dokumen capaian kinerja Penyuluh Perikanan, dan SKP Penyuluh Perikanan beserta data dukungannya,
- d) Evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok) Triwulan I Tahun 2024 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>120</b>
<b>2</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1	3	120
<b>3</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	7	7	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 120%. Begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp.

7.720.600.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.367.920.621 (19,95%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100,05%.

**Indikator Kinerja 3**

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok), Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Perikanan setempat.;

Adapun cara pengukuran IKU ini yaitu Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 9. Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok)

**Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
406	195	128	70	131	187,14	2,34	530	24,72

Berdasarkan tabel diatas pada triwulan I Tahun 2024 capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 131 kelompok dari target sebanyak 70 kelompok. Jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2023, indikator ini memiliki kenaikan sebesar 2,34% dengan jumlah realisasi di tahun tersebut sebanyak 128 kelompok. Kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya dapat dikarenakan data dukung yang disampaikan oleh penyuluh telah sesuai dengan ketentuan sehingga data tersebut dapat dijadikan capaian IKU dan juga dikarenakan terdapat kenaikan target dalam pemenuhan capaian IKU ini, namun demikian dengan realisasi yang telah dicapai IKU ini tetap melebihi target yang telah ditentukan. Artinya pada tahun ini, terdapat

peningkatan kinerja penyuluh dalam memenuhi pencapaian target indikator pembentukan kelompok.

Terlampauinya capaian dari target yang telah ditetapkan juga dapat dikarenakan banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru serta kinerja penyuluh SATMINKAL BRPPUPP sangat baik sehingga dapat membentuk banyak kelompok baru di wilayah binaan penyuluh masing-masing. Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di BRPPUPP pada triwulan I Tahun 2024 dapat melampaui target antara lain adalah IKU Pembentukan kelompok merupakan salah satu IKU utama yang harus dicapai oleh penyuluh dan dituangkan di SKP sehingga penyuluh harus mencapai targetnya, kemudian potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok serta banyaknya kelompok-kelompok baru yang terbentuk karena adanya fenomena bantuan bagi kelompok.

Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok) triwulan I Tahun 2024 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan</b>	<b>70</b>	<b>131</b>	<b>120</b>
<b>2</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	144	120
<b>3</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	70	70	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 120%. Begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 7.720.600.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.367.920.621 (19,95%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100,05%.

**Indikator Kinerja 4**

Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Swadaya, UMKM yang disuluh, dan P2MKP

Tabel 11. Capaian IKU Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)

**Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	1.075	-

Pada Indikator Kinerja Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP capaian kinerja ini berasal dari rekap tenaga kerja yang terdiri dari Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Perikanan Swadaya, dan UMKM binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPPUPP. Untuk pengukuran iku ini dilakukan diakhir tahun 2024.

**SASARAN KEGIATAN 2 :**

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

**Indikator Kinerja 5**

Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)

Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village (SFV)

Sesuai dengan Keputusan Ka BPPSDM No.38/2022, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SFV akan terbentuk desa perikanan

unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

Indikator capaian Input :

- Penilaian calon lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV oleh TAP dan Unit Kerja Pusat
- Jumlah desa dikembangkan sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV yang dikeluarkan melalui SK Ka BPPSDM

Indikator capaian Output :

- Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan Tridarma Perguruan Tinggi pada lokasi Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV oleh unit kerja pusat

Indikator Outcome :

- Penilaian hasil pelaksanaan Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV yang dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan berdasarkan instrument penilaian
- Penghitungan capaian minimal sd indikator capaian output

Tabel 12. Capaian IKU Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas)

**Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Pada Tahun 2024, BRPPUPP memiliki iku ini yaitu Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP yaitu Desa Perikanan Cerdas. Di tahun ini target yang telah disepakati yaitu 3 desa dan untuk capaiannya dilakukan pengukuran diakhir tahun 2024.

**Indikator Kinerja 6**

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan

memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan percontohan dan Pedoman SFV.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan dan Pedoman SFV.

Tabel 13. Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok).

**Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok).**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	2	-

Untuk indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan KP di Samtminkal BRPPUPP target di Tahun 2024 sebanyak 2 kelompok dan untuk capaian kinerjanya akan dilakukan pengukuran diakhir periode tahun 2024 sebanyak 2 kelompok. Pelaksana untuk kegiatan percontohan ini adalah dari Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP). Bentuk dari kegiatan percontohan yang dilaksanakan yaitu menyediakan teknologi yang diterapkan dan disampaikan kepada Kelompok binaan Penyuluh.

**SASARAN KEGIATAN 3 :**

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

**Indikator Kinerja 7**

Nilai PNBP Satker BRPPU-PP (Rupiah)

Definisi dari IKU ini yaitu Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah

Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum :

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP

b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP

c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN

PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP

Formula :

Surat penyampaian Capaian PNBP dari BPPSDM KP

Tabel 14. Capaian IKU Nilai PNBP Satker BRPPU-PP (Rupiah)

**Nilai PNBP Satker BRPPU-PP (Rupiah)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	10.709.300	12.745.639	14.552.427	114,18	35,89	40.000.000	36,38

Untuk realisasi indikator kinerja PNBP capaian di triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 14.552.427 dengan target Rp. 12.745.639 dan persentase sebesar 114,18%.

Nilai PNBP BRPPUPP yang didapat di triwulan I Tahun 2024 berasal dari penerimaan Umum dan Fungsional yang didapatkan dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rincian terlampir pada tabel berikut.



Tabel 15. Rincian PNBP per Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan	Jumlah
1	Penerimaan Umum	Rp. 7.952.427
2	Penerimaan Fungsional	Rp. 6.600.000
Jumlah Penerimaan TW 1 2024		Rp. 14.552.427
# Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah#		

Tabel 23. Rincian PNBP dari Surat penyampaian Capaian PNBP dari BPPSDM KP

**CAPAIAN PNBP SATKER BPPSDM  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Nama Satker	Target PNBP DIPA 2024	Capaian PNBP 2024			
		Januari	Februari	Maret	Total
<b>BPPSDMKP</b>	<b>32.134.003.000</b>	<b>1.179.105.415</b>	<b>3.466.601.732</b>	<b>3.448.022.117</b>	<b>8.093.729.264</b>
<b>SATKER NON BLU</b>	<b>14.362.697.000</b>	<b>1.147.858.669</b>	<b>1.672.214.370</b>	<b>1.279.268.591</b>	<b>4.099.341.630</b>
SUPM TEGAL	284.242.000	27.814.312	864.312	864.312	29.542.936
POLTEK KP BITUNG	427.260.000	35.765.644	47.217.144	25.682.394	108.665.182
BPPP MEDAN	380.000.000	23.844.087	37.160.000	26.335.308	87.339.395
BPPP AMBON	681.984.000	2.151.169	11.451.169	70.176.577	83.778.915
BPPP BANYUWANGI	770.875.000	6.546.085	451.915.450	83.245.450	541.706.985
BPPP BITUNG	188.600.000	94.573.158	26.084.548	6.140.748	126.798.454
AK KP WAKATOBI	15.677.000	350.000			350.000
LRSDKP	48.964.000	976.781			976.781
LPTK	3.344.000	1.170.431	142.494	332.486	1.645.411
PUSAT PENYULUHAN KP	-	1.617.568			1.617.568
BRPI	-	25.000	1.204.750		1.229.750
<b>BRPPUPP</b>	<b>40.000.000</b>	<b>11.327.713</b>	<b>1.687.713</b>	<b>1.537.001</b>	<b>14.552.427</b>
BRPSDI	2.000.000	1.071.280	71.280	3.671.280	4.813.840
LRPT	-		320.000	160.000	480.000
BBRBLPP	549.900.000	91.193.783	53.789.340	50.568.274	195.551.397
BRBAPP	1.610.607.000	122.693.156	51.918.490	123.153.990	297.765.636
BRPBATPP	92.050.000	12.847.505	19.434.905	14.602.905	46.885.315
BRBIH	177.044.000	115.000	637.000	8.328.000	9.080.000
BRPI	408.420.000	57.411.370	95.753.770	87.951.535	241.116.675
LRBRL	14.050.000	2.786.811	36.811	10.721.811	13.545.433
BBRPPBKP	15.000.000		26		26
BBRSEKP	-	36.540.186	1.000.000	1.000.000	38.540.186
POLTEK KP KARAWANG	235.011.000	6.815.684	25.004.934	10.256.934	42.077.552
POLTEK KP KUPANG	109.774.000			1.134.165	1.134.165
POLTEK KP BONE	380.000.000	5.879.001	68.980.561	23.343.058	98.202.620
POLTEK KP DUMAI	104.000.000	839	18.900.000	10.435.400	29.336.239
POLTEK KP PANGANDARAN	365.968.000	1.061.991	13.851.265	1.135.289	16.048.545
POLTEK AUP JAKARTA	2.707.728.000	322.458.234	263.759.765	397.664.183	983.882.182
SUPM LADONG	105.364.000	1.604.505	4.504.508	1.604.505	7.713.518
SUPM PARIAMAN	1.278.819.000	27.154.755	41.680.727	806.782	69.642.264
SUPM PONTIANAK	265.858.000	3.050.182			3.050.182
SUPM WAEHERU	475.000.000	6.691.703	63.577.571	63.370.823	133.640.097
SUPM SORONG	264.989.000	10.660.000	189.970.000		200.630.000
POLTEK KP JEMBARANA	430.672.000	170.595.000		164.170.150	334.765.150
SEKRETARIAT BPPSDMKP	-	1.876.245	20.122.052	7.634.141	29.632.438
POLTEK KP SORONG	364.680.000	55.431.840	29.112.535	10.749.840	95.294.215
SUPM KOTA AGUNG	700.817.000	2.096.101	130.399.700	1.149.700	133.645.501
BDA SUKAMANDI	864.000.000	1.661.550	1.661.550	71.341.550	74.664.650
<b>SATKER BLU</b>	<b>17.771.306.000</b>	<b>31.246.746</b>	<b>1.794.387.362</b>	<b>2.168.753.526</b>	<b>3.994.387.634</b>
POLTEK KP SIDOARJO	7.241.100.000	29.807.070	777.439.198	220.722.998	1.027.969.266
BPPP TEGAL	10.530.206.000	1.439.676	1.016.948.164	1.948.030.528	2.966.418.368

Salah satu faktor yang mendukung dan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU PNBP sehingga dapat melebihi target yaitu :



- a) Kontribusi dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
- b) Kontribusi dari hasil Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- c) Kontribusi dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Pengelolaan Sarana dan Prasarana riset perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 6.165.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 114,18% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Capaian IKU Nilai PNBPR BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBPR Satker BRPPU-PP dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan</b>	<b>12.745.639</b>	<b>14.552.427</b>	<b>114,18</b>
<b>2</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	52.650.000	297.765.636	120
<b>3</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	17.756.000	46.885.315	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan satker lainnya memperoleh capaian di atas 100%, IKU Nilai PNBPR sebesar 114,18% yang artinya capaian untuk IKU ini seluruh telah melampaui target yang ditentukan.

### Indikator Kinerja 8

Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)

Definisi IKU ini yaitu Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BPPSDM diantaranya: Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT. Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan

(PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT lingkup BRPPUPP, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.

Tabel 17. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)

**Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	5	-

Untuk IKU Tenaga Kerja yang terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP merupakan IKU baru di Tahun 2024 dan untuk perhitungan capaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2024, sehingga untuk triwulan I 2024 belum memiliki capaian.

**Indikator Kinerja 9**

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)

Definisi IKU ini yaitu nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHK) BPK atas laporan keuangan (LK) BRPPUPP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 (audited) tidak melebihi  $\leq 0,5\%$  dari total realisasi anggaran Unit Eselon 3 Tahun 2023.

Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas tertinggi persentase} = \frac{\text{Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA 2023}}{\text{Realisasi RIIL TA 2023}} \times 100\%$$

Tabel 18. Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)

**Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	<0,5	-

Untuk indikator ini perhitungan capaiannya akan dilakukan pada akhir tahun 2024 sehingga belum memiliki capaian hingga triwulan I 2024.

## Indikator Kinerja 10

Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)

Definisi IKU ini antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2019).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

IKU Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 komponen dengan bobot sebagaimana tersebut di bawah ini:

- A. Kualifikasi (Bobot 25%)
- B. Kompetensi (Bobot 40%)
- C. Kinerja (Bobot 30%)
- D. Disiplin (Bobot 5%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/Sarjana Muda (SM);
- e. Pendidikan D-2 (Diploma-Dua)/D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma- Satu)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15

2	Pendidikan DIII	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

- Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional;
- Diklat Teknis;
- dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara,

dengan formula sebagai berikut:

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Struktural	Pejabat Fungsional	Staf
	<i>Diklat Struktural</i>	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<i>Diklat Fungsional</i>	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	-	0	-
	<i>Diklat 20 JP</i>	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	0	0
	<i>Seminar</i>	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

No	Keterangan Nilai SKP ***)	Nilai SKP	Nilai PPKP
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai Bobot 5 %
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

1. Kualifikasi dihitung dari kondisi pendidikan terkini dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
2. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
  - Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, misalkan Pejabat Eselon I Tidak Pernah melaksanakan Diklatpim Tingkat I maka pegawai tersebut nilainya 0;
  - Diklat Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 5 tahun terakhir, apabila dalam kurun waktu tersebut Pernah melaksanakan diklat dan seminar maka nilai kompetensi pegawai tersebut yaitu 15 dan 10 untuk Struktural dan Jabfung serta 22,5 dan 17,5 untuk staf;
3. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP dan di kolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP);
4. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin dan diupdate pada aplikasi SIMPEG

Berdasarkan bobot penilaian Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPA BRPPUPP} = \frac{\sum \text{Nilai IPA Pegawai BRPPUPP}}{\sum \text{Pegawai BRPPUPP}}$$

Nilai IPA Pegawai BRPPUPP adalah total nilai IPA pegawai BRPPUPP dibagi total pegawai BRPPUPP dengan perhitungan masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini:

$$\text{Nilai IPA Pegawai Struktural} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklatpim} + \text{diklat 20JP} + \text{seminar}) / 3 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

$$\text{Nilai IPA Pegawai JF} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklat fungsional} + \text{diklat 20JP} + \text{seminar}) / 3 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

$$\text{Nilai IPA Pegawai JFU} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklat 20JP} + \text{seminar}) / 2 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

Bukti capaian akhir antara lain:

1. Data Tingkat Pendidikan (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)
2. Data Kompetensi dasar (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)
3. Data SKP (diambil dari data dasar pada Aplikasi e-SKP KKP)
4. Data Hukuman Disiplin (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)

Tabel 19. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)

**Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	80	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP belum memiliki capaian di triwulan I 2024, capaian tersebut akan muncul di semester I 2024, IKU ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM KP.

**Indikator Kinerja 11**

Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)

Definisi IKU ini yaitu Nilai PM SAKIP Level III BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BPPSDM. Unit Kerja level III lingkup BPPSDM terdiri Sekretariat BPPSDM, Pusat Riset Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Dengan cara perhitungan:

Nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM, Kategori nilai PM SAKIP Level II lingkup BPPSDM yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Bukti data dukungnya berupa:

- (1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen.
- (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM

Tabel 20. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)

**Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	79	-

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP untuk triwulan I 2024 belum memiliki capaian dikarenakan pengukurannya dilakukan pada triwulan III atau akhir tahun 2024.

**Indikator Kinerja 12**

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK

A. Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

**Aspek Kepatuhan (A-I) :** Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi :

PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW IV

Jenis Dokumen yang dibutuhkan	Keterangan
1 Perjanjian Kinerja*	Revisi terakhir jika ada
2 Manual IKU	Revisi terakhir jika ada
3 Rincian Target IKU*	Revisi terakhir jika ada
4 Rencana Aksi*	Khusus level 2
5 LKJ/LCK Triwulan I*	
6 LKJ/LCK Triwulan II*	LCK bisa diambil pada aplikasi kinerjaaku
7 LKJ/LCK Triwulan III*	
8 Data dukung LKJ/LCK Tw III	Cek per IKU

Keterangan:  
\* Dokumen ditandatangani

**Nilai Aspek Kepatuhan = Bobot 30% X Nilai total dokumen**

$$\text{Nilai Total Dokumen} = \frac{\text{dokumen yang ada}}{\text{total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$$

Contoh perhitungan:

Dokumen yang ada hanya bisa dilengkapi 7 dokumen

Nilai total dokumen =  $(7 / 8) \times 100 = 87,5$

Nilai aspek kepatuhan =  $30\% \times 87,5 = 26,25$

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kepatuhan sebesar 26,25

**Aspek Kesesuaian (A-II) :** Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data

Kesesuaian Data dan Informasi		Kesesuaian Target		Kesesuaian Realisasi	
Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max
PK ↓ Manual IKU	1 (A)	PK ↓ LKJ/LCK TW III	1 (E)	LKJ/LCK TW III ↓ Kinerjaku	1 (H)
PK ↓ Rincian Target IKU	1 (B)	PK ↓ Kinerjaku	1 (F)		
PK ↓ Rencana Aksi	1 (C)	LKJ/LCK TW III ↓ Kinerjaku	1 (G)		
Rincian Target ↓ Kinerjaku	1 (D)				

Nilai Aspek Kesesuaian = Bobot 30% X Rata-rata Kesesuaian

$$\text{Rata-rata Kesesuaian} = \frac{A+B+C+D+E+F+G+H}{8} \times 100$$

Contoh perhitungan:  
 Nilai perbandingan (A-H) yang diperoleh mendapat skor 7,8  
 Rata-rata kesesuaian =  $(7,8 / 8) \times 100 = 97,5$   
 Nilai aspek kesesuaian =  $30\% \times 97,5 = 29,25$   
 Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kesesuaian sebesar 29,25

**Aspek Ketercapaian (A-III) :** Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku.

Nilai Capaian IKU + IK Tw I	Nilai Capaian IKU + IK Tw II	Nilai Capaian IKU + IK Tw III
99,00 (A)	102,00 (B)	103,00 (C)

Nilai Aspek Ketercapaian = Bobot 40%  $\left( \frac{\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK}}{120} \times 100 \right)$

$$\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK} = \frac{A+B+C}{3} \times 100$$

Contoh perhitungan:  
 Nilai Capaian IKU + IK yang diperoleh Tw I: 99, Tw II: 102, Tw III: 103  
 Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK =  $(99+102+103) / 3 = 101,33$   
 Nilai aspek ketercapaian =  $40\% \times ((101,33 / 120) \times 100) = 33,78$   
 Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek ketercapaian sebesar 33,78

B. **Nilai Rekon Kinerja** adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.



ASPEK KEPATUHAN (30%)	ASPEK KESESUAIAN (30%)	ASPEK KETERCAPAIAN (40%)
A-I	A-II	A-III
SKOR NILAI UNIT = A-I + A-II + A-III = XX,XX		

SKALA	
0 - 50	BURUK
>50 - 75	KURANG
>75 - 85	CUKUP
>85 - 90	BAIK
>90 - 100	SANGAT BAIK

Tabel 21. Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)

**Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	94	-

Untuk indikator nilai rekonsiliasi kinerja BRPPUPP di triwulan I 2024 belum memiliki capaian dikarenakan pengukurannya dilakukan pada akhir tahun 2024 sesuai dengan manual iku yang ada.

**Indikator Kinerja 13**

Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem manajemen pengetahuan yang dimaksud dalam IKU ini adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pemanfaatan teknologi informasi ini dinilai berdasarkan pemanfaatan aplikasi Bitrix 24 KKP dalam menyampaikan informasi berupa berita ataupun laporan kegiatan terkait riset maupun non riset. Pada Tahun 2024 IKU ini ditargetkan sebesar 94%.

IKU ini memiliki pengertian suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Tabel 22. Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

**Persentase Unit Kerja BRPPUP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
32,92	100	100	94	133,33	141,84	33,33	94	141,84

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I Tahun 2024 ini capaian indikator kinerja presentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan memiliki persentase capaian melebihi 120% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu besar capaian 133,33% dengan target 94. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKU ini mengalami peningkatan sebanyak 33,33% dimana realisasi di triwulan I tahun 2023 hanya sebesar 100%.

IKU Manajemen Pengetahuan ini menggunakan platform portal Collaboration Office (<https://portal.kkp.go.id>). Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini dapat dikarenakan pengguna aplikasi Coofis dalam hal ini yaitu Kepala BRPPUPP telah menunjukkan keaktifan dalam melakukan posting atau sharing dan informasi dan kegiatan dan adanya perubahan perhitungan kinerja IKU ini yang memperbolehkan capaian indikator lebih dari 100% sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusriskan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusriskan.
- c) Monitoring keaktifan pengguna Coofis untuk selalu melakukan posting atau sharing informasi dan kegiatan

IKU Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM KP, dimana capaian kinerja BRPPUPP dalam penilaian Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan I tahun 2024 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusat Riset Perikanan. Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Puriskan, BRPPUPP memiliki capaian yang sama dengan sebelas satker

lingkup Pusat Riset Perikanan. Capaian nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker lingkup Puriskan Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 31 berikut.

Tabel 23. Capaian Nilai Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Pusrisikan

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan</b>	<b>94</b>	<b>133,33</b>	<b>120</b>
<b>2</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	94	133,33	120
<b>3</b>	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	94	133,33	120

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian BRPPUPP terhadap IKU ini memiliki persentase yang sama dengan satker lain yaitu 120% dimana dengan angka tersebut capaian setiap satker sudah melampaui target yang ditentukan. Kedepannya perlu capaian tersebut perlu dipertahankan agar mencapai target atau melebihi target yang telah ditentukan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Penyiapan dan penyusunan bahan updating website BRPPUPP dengan anggaran sebesar Rp. 13.250.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%), Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 120%.

#### Indikator Kinerja 14

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)

Definisi IKU ini yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2024 (Triwulan I Tahun 2024); Bukti data dukungnya berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BPPSDM KP.

Tabel 24. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)

**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUP-PP (%)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	75	82	100	120	33,33	82	120

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I Tahun 2024 ini capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan(%) memiliki presentase capaian sebesar 100% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 82.

Capaian IKU ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2024 (Triwulan I Tahun 2024). Capaian IKU sebesar 100% menunjukkan bahwa BRPPUPP telah menyelesaikan temuan atau tindak lanjutnya hingga tuntas sebelum pengukuran triwulan I, sehingga capaian IKU sesuai target capaian.

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan BRPPUPP merupakan indikator baru BRPPUPP dari tahun 2023. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 2.316.000 (8,75%) dengan pagu Rp 26.480.000,-

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP mencapai target pada triwulan I tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh telah ditindaklanjutinya rekomendasi Itjen KKP oleh BRPPUPP yang termuat pada aplikasi SIDAK.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusriskan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusriskan.

Capaian nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker lingkup Puriskan triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan dengan Satminkal lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	82	100	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	82	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	82	100	120

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP memiliki persentase capaian yang sama dengan BRPBATPP Bogor dan BRPBAPPP Maros karena dilakukan sampling oleh Itjen KKP dan telah melakukan tindak lanjut secara keseluruhan sehingga capaiannya adalah sebesar 100,00%..

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Pelayanan monitoring dan evaluasi riset perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 26.480.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. Rp 2.316.000 (8,75%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 111,25%

**Indikator Kinerja 15**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Tabel 26. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)

**Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	93,76	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRPPUPP belum memiliki capaian di Triwulan I 2024. Penarikan data capaian IKU IKPA triwulan II atau Semester I tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2024.

**Indikator Kinerja 16**

Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)

Definisi IKU ini adalah Nilai serapan anggaran di tahun berjalan Berdasarkan target penyerapan anggaran tiap triwulan dengan formulasi sebagai berikut:

- a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah
- b. Target penyerapan tahun 2023 yakni 81%
- c. Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif
- d. Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

Bukti capaian IKU ini berupa Laporan Hasil pengolahan data pada aplikasi SMART DJA berupa Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP pada akhir tahun.

Tabel 27. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)

**Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	82	-

Berdasarkan tabel diatas, Nilai NKA BRPPU-PP (nilai) Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai) belum memiliki capaian di Triwulan I 2024. Pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun 2024.

**Indikator Kinerja 17**

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)

Definisi iku ini yaitu Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPPU-PP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja BRPPU-PP.

Dasar Hukum:

PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP

PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN

Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

Bukti data dukungnya yaitu berupa:

1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa , Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll
2. Laporan Kegiatan Kemitraan

Tabel 28. Capaian IKU Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)

**Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	4	-

Berdasarkan tabel diatas, Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan) memiliki target sebanyak 4 kemitraan dan capaian akan didapatkan pada akhir Tahun 2024.

**Indikator Kinerja 18**

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP(%)

Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPPUPP berupa penyusunan kebijakan

teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

- a. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- b. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Formula :

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Hasil Layanan}}{\text{Jumlah Target Dokumen Hasil Layanan}} \times 100\%$$

Tabel 29. Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP(%)

**Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPPU-PP (%)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
100	100	100	100	100	100,00	0,00	100,00	100,00

Untuk indikator ini, realisasi yang dicapai pada triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan jumlah target yang sama. Sehingga persentase capaian yang didapatpun sebesar 100%.

Perolehan capaian indikator berikut dikarenakan kelengkapan dokumen pendukung yang telah tersusun di Triwulan I tersedia sesuai dengan target sehingga persentase capaian untuk indikator berikut sebesar 100%.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan



b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusrisikan.

c) Menyediakan dokumen pendukung layanan dukungan manajemen teknis BRPPUPP Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP (%) ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satker lain lingkup Pusat Riset Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP (%) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, seluruh satker memiliki persentase yang sama untuk IKU ini yaitu sebesar 100% yang artinya seluruh satker telah mencapai target yang telah ditentukan. Kedepannya capaian tersebut perlu dipertahankan agar mencapai target atau melebihi target yang telah ditentukan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Gaji dan Tunjangan riset perikanan, kebutuhan sehari-hari perkantor, langganan jasa dan pemeliharaan kantor serta pengelolaan sarana dan prasarana riset perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 13.448.967.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.582.377.038 (19,20%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 80,8%.

### Indikator Kinerja 19

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran

- d. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- e. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- f. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Formula :

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Hasil Layanan}}{\text{Jumlah Target Dokumen Hasil Layanan}} \times 100\%$$

Tabel 31. Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

**Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)**

Realisasi TW I			Triwulan I				RENSTRA 2020-2024	
2021	2022	2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
100	100	100	100	100	100,00	0,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas persentase layanan dukungan manajemen internal BRPPUPP sampai dengan triwulan I Tahun 2024 telah mencapai realisasi sebesar 100% dimana angka tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian dokumen layanan dukungan manajemen yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll. pada Triwulan I 2024 telah terpenuhi sehingga memperoleh persentase sebesar 100%.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusriskan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusriskan.
- c) Menyediakan dokumen pendukung layanan dukungan manajemen teknis BRPPUPP

Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) ini jika dibandingkan dengan 2 (dua) Satker lain lingkup Pusat Riset Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 32. Perbandingan Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPU-PP (%) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, seluruh satker memiliki persentase yang sama untuk IKU ini yaitu sebesar 100% yang artinya seluruh satker telah mencapai target yang telah ditentukan. Kedepannya capaian tersebut perlu dipertahankan agar mencapai target atau melebihi target yang telah ditentukan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Pelayanan tata usaha kerumahtanggaan Pelatihan dan Penyuluhan, gaji dan tunjangan penyuluh perikanan, operasional dan pemeliharaan kantor penyuluhan, pelayanan perencanaan dan penganggaran internal pelatihan dan penyuluhan KP, pelayanan monev penyuluhan KP dengan anggaran sebesar Rp. 60.180.287.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.955.904.604 (23,19%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 76,81%.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada triwulan I tahun 2024, DIPA BRPPUPP memiliki 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal sebesar **Rp. 86.207.989.000**, yang terdiri dari Program Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pagu awal **Rp. 10.380.600.000** dan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 75.827.389.000**

Sampai dengan akhir Triwulan I TA 2024, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPPUPP sebanyak 5 kali, yaitu :

1. Revisi 1: Revisi POK
2. Revisi 2: Revisi Blokir AA
3. Revisi 3: Revisi POK

4. Revisi 4: Revisi POK

5. Revisi 5: Revisi Penarikan Halaman 3 DIPA

Penyerapan anggaran BRPPUPP sampai dengan 31 Maret 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 33. Realisasi Anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024

KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>2375</b>	<b>PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>10.380.600.000</b>	<b>1.367.920.621</b>	<b>17,41</b>
2375.QDD.001	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dari penyuluh KP	5.600 Kelompok	7.720.600.000	1.367.920.621	19,95
2375.QDD.002	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	2 produk	2.260.000.000	0	0
<b>2378</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</b>		<b>75.827.389.000</b>	<b>16.769.059.083</b>	<b>22,17</b>
2378.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	760.000	760.000	100
2378.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	15.073.000	0	0
2378.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	286.410.000	43.745.073	20,49
2378.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	75.152.009.000	16.637.088.010	22,14
2378.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	53 Orang	184.142.000	85.000.000	92,84
2378.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	45.340.000	150.000	0,33
2378.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	84.060.000	2.316.000	2,76
2378.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	59.595.000	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>86.207.989.000</b>	<b>18.136.979.704</b>	<b>21,03</b>

Sumber : data realisasi, aplikasi SAKTI per tgl 31 Maret 2024

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di triwulan I tahun 2024, maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPPUPP di triwulan I Tahun 2024.

Tabel 34. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU

Indikator Kinerja Kegiatan		Kegiatan Pendukung (Renja/Rkaki 2024)	Kode	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW I	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TW I	% Capaian NPSS	Efisiensi
<b>SK.1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>				<b>Rp. 10.380.600.000</b>	<b>Rp 1.367.920.621</b>	<b>13,17</b>				<b>120%</b>	<b>106,83</b>
1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh KP	2375.QDD.001.05 1.A	Rp. 7.720.600.000	Rp 1.367.920.621	19,95	Kelompok	900	1.110	120	100,05
2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)	Peningkatan Kelas Kelompok					Kelompok	5	6	120	
3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok)	Penumbuhan Kelompok					Kelompok	70	131	120	
4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	-	-	-	-	-	Orang	-	-	-	-
<b>SK. 2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP</b>				<b>Rp 2.260.000.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>0</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
5	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	1. Percontohan Perikanan Budidaya 2. Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji	2375.QDD.052	Rp 2.260.000.000	Rp 0	0	Desa	-	-	-	-
6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok)	2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan 2. Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji					0	Kelompok	-	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung (Renja/Rkaki 2024)	Kode	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW I	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TW I	% Capaian NPSS	Efisiensi
<b>SK. 4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker</b>			<b>Rp 75.827.389.000</b>	<b>Rp 16.769.059.083</b>	<b>22,17</b>				<b>114,14</b>	<b>91,97</b>
9	Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah)	-	Rp 54.110.000	-		Rupiah	12.745.639	14.552.427	114,18	114,18
10	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)	Pemeliharaan kantor	2378.EBA.994.002 .PC	Rp 1.595.167.000	Rp 95.581.688	5,99	Orang	-	-	-
10	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPU-PP (%)	Perjalanan Dinas Pimpinan	2378.EBA.962.601 .A	Rp 85.000.000	Rp 25.819.753	30,58	%	-	-	-
11	Indeks profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)	1. Pengelolaan ADM Kepegawaian 2. Tata Persuratan dan Kearsipan	2378.EBC.954.601 .A 2378.EBA.962.601 .B	Rp 184.142.000	Rp 85.000.000	46,16	Indeks	-	-	-
12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)	Layanan Manajemen Keuangan	2378.EBD.955.601 .A	Rp 59.595.000	Rp -	-	Nilai	-	-	-
13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan	2378.EBD.952.601 .A	Rp 6.340.000	Rp -	-	Nilai	-	-	-
14	Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	1. Penyusunan Website 2. Pengelolaan perpustakaan dan pelayanan publik	2378.EBA.958.601 .B 2378.EBA.958.601 .C	Rp 13.250.000	Rp -	-	%	94	133,33	120
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)	Pelayanan Monitoring dan evaluasi riset perikanan	2378.EBD.953.601 .A	Rp 26.480.000	Rp 2.316.000	8,75	%	82	100	120
16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)	Layanan BMN	2378.EBA.956.601 .A	Rp 760.000	Rp 760.000	100	Nilai	-	-	-
17	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	2378.EBA.994.002 .AD	Rp 171.468.000	Rp 21.300.000	12,42	Nilai	-	-	-

18	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	Penjalinan Kerjasama	2378.EBA.958.601 .A	Rp 1.823.000	Rp -	-	Kemitraan	-	-	-	-
19	Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPUPP (%)	1. Gaji dan tunjangan 2.Kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan Jasa dan Pemeliharaan kantor 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana riset perikanan	2378.EBA.994.001 .A 2378.EBA.994.002 .AA 2378.EBA.962.601 .C	Rp 13.448.967.000	Rp 2.582.377.038	19,20	%	100	100	100	80,8
20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	1.pelayanan tata usaha kerumahtanggaan pelatihan dan penyuluhan 2.gaji dan tunjangan Penyuluh Perikanan 3.Operasional dan Pemeliharaan kantor penyuluhan 4.Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pelatihan dan Penyuluhan KP 5.Pelayanan Monev Penyuluhan KP	2378.EBA.962.201 .A 2378.EBA.994.001 .BB 2378.EBA.994.002 .BB 2378.EBD.952.201 2378.EBD.953.201	Rp 60.180.287.000	Rp 13.955.904.604	23,19	%	100	100	100	76,81
				<b>Rp 86.207.989.000</b>	<b>Rp 18.136.979.704</b>	<b>21,03</b>				<b>115,57</b>	<b>94,54</b>

Sumber : aplikasi kinerjaku dan OMSPAN Kementerian Keuangan

### 3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024

Efisiensi adalah cara untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga (sumberdaya manusia) dan biaya (anggaran). Suatu pekerjaan dinilai efisien apabila sumber daya (input) yang digunakan sedikit, namun mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan rencana atau harapan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi, data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 115,57%, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 21,03%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 94,54% yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 100%, seperti:
  - A. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok) sebesar 120%
  - B. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok) sebesar 120%
  - C. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok) sebesar 120%
  - D. Nilai PNBP Satker BRPPU-PP sebesar 114,18%
  - E. Persentase unit kerja BRPPUPP sebesar 120%



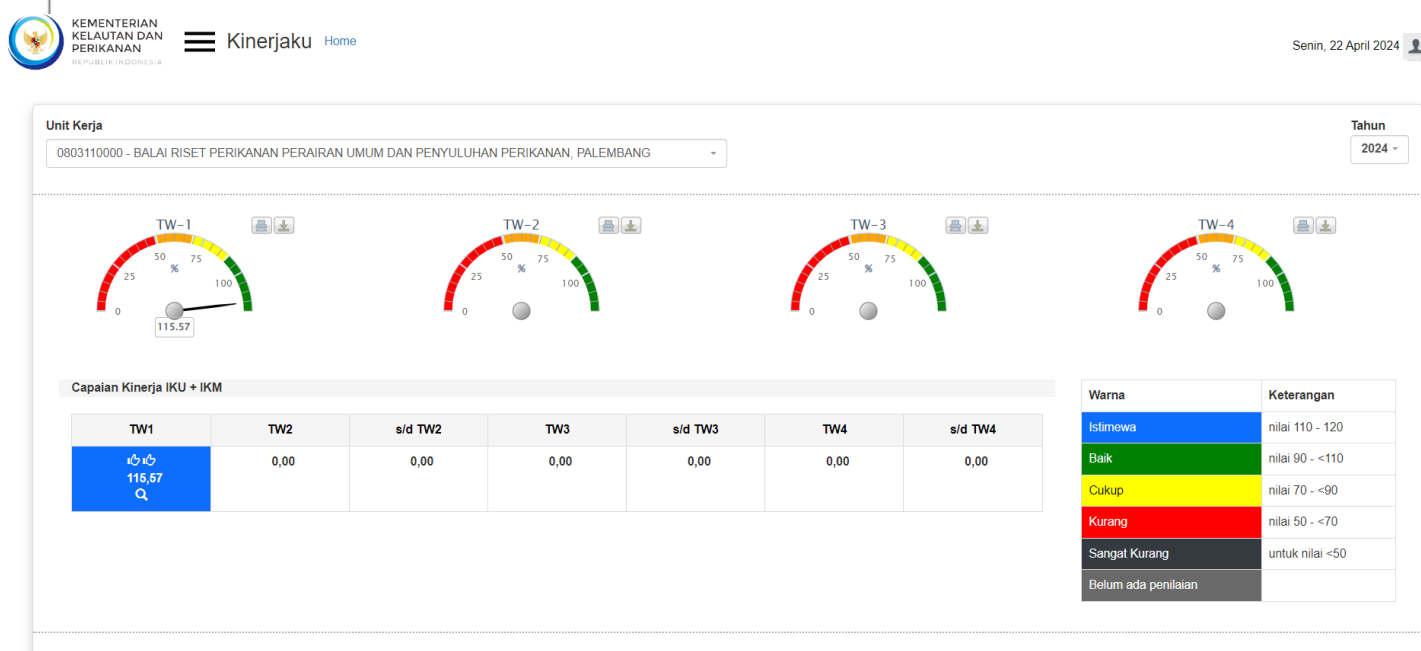
# BAB IV - PENUTUP

- Capaian Kinerja Utama
- Permasalahan dan Rekomendasi



### 4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2024 sebesar 115,57%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashbord Kinerja Triwulan I Tahun 2024 BRPPUPP

Pada Triwulan I Tahun 2024 dari 19 IKU terdapat 8 IKU BRPPUPP telah mencapai target sehingga berstatus biru dan hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 1.110 kelompok dari target triwulan I yang ditetapkan sebanyak 900 kelompok dengan persentase sebesar 120%
2. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok) tercapai 6 kelompok dari target triwulan I 2024 yang ditetapkan yaitu 5 kelompok dengan persentase sebesar 120%

3. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok) tercapai 131 kelompok dari target triwulan I Tahun 2024 yang ditetapkan yaitu 70 kelompok dengan persentase sebesar 120%
4. Nilai PNBK Satker BRPPU-PP (Rupiah) dengan capaian di triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 14.552.427,- dengan target yang ditetapkan sebanyak Rp 12.745.639,- dengan persentase sebesar 114,18%
5. Persentase unit kerja BRPPU-PP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai sebesar 133,33% dengan target triwulan I Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 94% dengan persentase sebesar 120%
6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%) dengan capaian sebesar 100% melebihi dengan target yang ditentukan dan persentase sebesar 120%
7. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

## 4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang terjadi pada triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
2. BRPPUPP sudah melakukan reviu renstra pada tahun 2023 namun belum disertai dengan perbaikan target kinerja tahun 2024 sesuai kebijakan perencanaan. Sehingga pada pembahasan perbandingan indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja jangka menengah masih membandingkan dengan target yang sebelumnya.

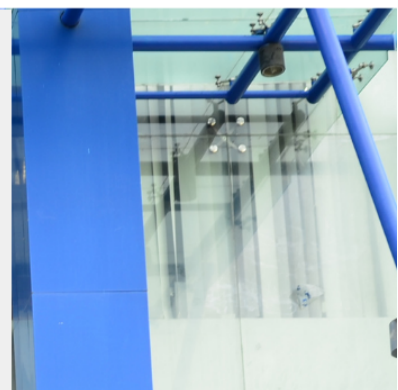
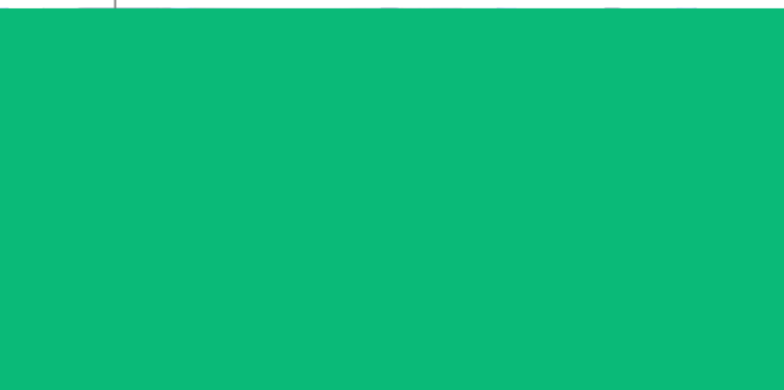
Secara umum Kinerja BRPPUPP pada triwulan I tahun 2024 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM KP maupun Pusat terkait informasi nomenklatur organisasi, tata kerja, serta tugas pokok dan fungsi balai yang baru, dan menyampaikan progresnya di internal BRPPUPP secara berkala melalui kegiatan apel pagi maupun kegiatan koordinasi lainnya.
2. BRPPUPP melakukan reviu renstra dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kebijakan terkait perubahan target perjanjian kinerja di tahun 2023 dan 2024.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPPUPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPPUPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPPUPP.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPPUPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

# LAMPIRAN





Lampiran 1

PK BRPPUPP-PUSRISKAN 02 Januari Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**  
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan  
Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**  
Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Pusat Riset Perikanan

PIHAK PERTAMA  
Kepala Balai Riset Perikanan  
Perairan Umum dan Penyuluhan  
Perikanan

  
Yayan Hikmayani

  
Rezki Antoni S

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1.	Nilai PNBP Satker BRPPU-PP (Rupiah)	40.000.000
		2.	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPPUP-PP (Orang)	5
		3.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUP-PP (%)	≤0,5
		4.	Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)	80
		5.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)	79
		6.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	94
		7.	Persentase Unit Kerja BRPPUP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUP-PP (%)	82
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)	93,76
		10.	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)	82
		11.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPPUP-PP (kemitraan)	4
		12.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPPU-PP (%)	100

**Data Anggaran :**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.647.102.000
<b>Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>15.647.102.000</b>

Jakarta, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Pusat Riset Perikanan

PIHAK PERTAMA  
Kepala Balai Riset Perikanan  
Perairan Umum dan Penyuluhan  
Perikanan

  
Yayan Hikmayani

  
Rezki Antoni S

PK BRPPUPP-PUSLATLUH 29 Desember Tahun 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [brsdm@kkp.go.id](mailto:brsdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**  
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan  
Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**  
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama  
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan  
Umum dan Penyuluhan Perikanan

—Rezki Antoni S



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN**  
**PENYULUHAN PERIKANAN**

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di BRPPUPP (Kelompok)	5.600
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP (Kelompok)	223
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di BRPPUPP (Kelompok)	530
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1.075
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	3
		6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPPUPP (kelompok)	2
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100

**Data Anggaran**

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10.380.600.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	60.180.287.000
<b>Total Anggaran Penyuluhan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan</b>		<b>70.560.887.000</b>

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama  
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Rezki Antoni S

Lampiran 2 SP tim Penyusun LkJP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 06, JAKABARING-PALEMBANG

TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601

LAMAN: [www.bp3ipalembang.kkp.go.id](http://www.bp3ipalembang.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK: [persurufanbrppupp@kkp.go.id](mailto:persurufanbrppupp@kkp.go.id)

**SURAT PERINTAH**

**PLT. KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

**NOMOR : B.106/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2023**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN KINERJA**

**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Institusi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);

**MEMBERI PERINTAH**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;

**KEDUA** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

Tim Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;

b. Pelaksana

1. Ketua:

Memimpin Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;

2. Manajer Kinerja:

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;

3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa:

a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:

- 1) visi, misi, dan program;
- 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
- 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. Indikator Kinerja:

- 1) Digunakan sebagai ukuran kinerja formal;



- 2) Indikator kinerja eselon III telah selaras dengan IKU Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
  - 4) Ditetapkan dengan Surat Perintah Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
- c. Dokumen Kontrak Kinerja:
- 1) Perjanjian Kinerja (PK):
    - a) Tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
    - b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
    - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
  - 2) Peta Strategis;
  - 3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
  - 4) Inisiatif Strategis/Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi:
- a. Menyusun pedoman/mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
  - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);
  - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
  - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
  - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran/ tahunan);

- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
  - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi;
  - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
  - j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
  - k. Menyusun laporan nilai evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
  - l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
  - n. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
  - o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
  - p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
  - q. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
  - r. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
  - s. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
5. Sub-Tim Kinerja Pegawai:
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;

- c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

- KETIGA : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Riset Perikanan;
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal, 18 Januari 2023

Pj. Kepala Balai Riset Perikanan  
Perairan Umum dan Penyuluhan  
Perikanan



Rezki Antoni S, S.Kel  
NIP. 19850619 201012 1 001

Lampiran : Surat Perintah Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan  
 Nomor : B.106/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2023  
 Tanggal : 18 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA  
 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM  
 DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengarah : Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Penanggung Jawab :

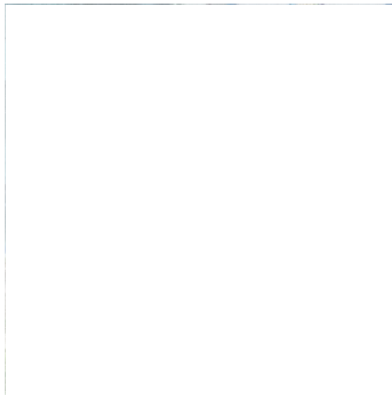
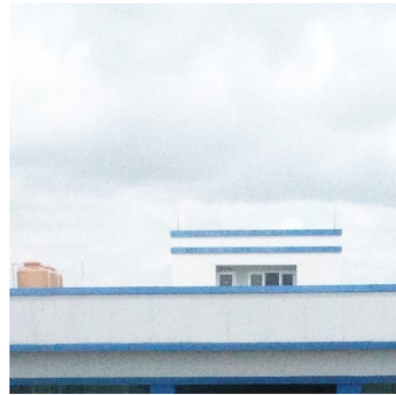
No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>Manajer Teknis</b>		
1.	Rezki Antoni S	Manajer
2.	Rully Ismanto	Manajer
3.	Sri Mulyani	Manajer
<b>Sub Tim Perencanaan Kinerja</b>		
1.	Acim Tirtana	Perencana
2.	Rezki Antoni S	Perencana
<b>Sub Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi</b>		
1.	Muthia Nurlestari Putri	Pelaksana
2.	Arismansyah	Pelaksana

Ditetapkan di Palembang  
 Pada Tanggal, 18 Januari 2023  
 Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan



*Rezki Antoni S*  
 Rezki Antoni S, S.Kel  
 NIP. 19850619 201012 1 001





# BRPPUPP - PALEMBANG



(0711) 5649600



Jl. Gub. H. Bastari No 8, Jakabaring, Palembang



bppsdm\_brppupp.palembang



[www.kkp.go.id/brsdm/brppupalembang](http://www.kkp.go.id/brsdm/brppupalembang)